

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

1.

Nama Unit Organisasi

:

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2.

Urusan Bidang

:

PKK
2.

Tugas

:

Memberikan Pelayanan Administrasi tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia.
3.

Fungsi

:

a.

Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia

b.

Penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia

c.

Penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia serta pembinaan hukum Kabupaten/Kota

d.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	1. Terselenggaranya beberapa perkara yang menyangkut kepentingan hukum Pemprov/Gubernur, pemenuhan HAM dan Indeks Pembangunan Hukum	Dokumen	1. Persentase gugatan yang menyangkut kepentingan hukum Pemprov/Gubernur dan nilai indeks laporan RANHAM mencapai Target	1. $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$	Data sidang perkara gugatan yang dimenangkan oleh Pemprov Sumsel, Laporan RANHAM hasil penilaian dari Kementerian HAM dan Laporan pembangunan Hukum	Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel
2.	Sasaran : Terpenuhinya Layanan Kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatkan Fasilitas Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Provinsi Kabupaten / Kota, Penyelesaian Masalah Hukum dan Penyelenggaraan HAM yang dilaksanakan	2. Terselenggaranya penegakan hukum peraturan daerah 3. Terselenggaranya penetapan produk hukum daerah Provinsi/Kab./Kota yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Dokumen Dokumen	2. Persentase Penegakkan Hukum Peraturan Daerah 3. Jumlah produk hukum Pemerintah Provinsi/Kab/Kota yang telah ditetapkan dan diundangkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang lebih tinggi	2. $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ 3. $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sesuai target.	Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel

